

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Reviu

Penulis membagi penelitian menjadi beberapa pokok pembahasan. Literatur reviu dapat membantu penulis dalam menjelaskan variable bebas, variable terikat serta keterkaitan keduanya. Ada beberapa penelitian yang telah membahas tentang industrialisasi di India maupun perekonomian China. Secara khusus penulis memfokuskan industri India pada bidang teknologi informasi. Diantara penelitian yang terdahulu, penulis mengambil referensi dari penelitian yang ditulis oleh Nofansyah Ibrahim dengan judul *Kebangkitan India: Dari Model Pembangunan Nehru ke Model Knowledge Based Society* (Ibrahim, *Kebangkitan India: Dari Model Pembangunan Nehru ke Model Knowledge Based Society*, 2013).

Dalam penelitiannya, Ibrahim menyebutkan bahwa pada tahun 1948, sesaat setelah kemerdekaannya, India memperkenalkan resolusi kebijakan industri. Setelah resolusi ini disahkan kedalam konstitusi, kebijakan industri India telah mengalami beberapa kali revisi pada tahun 1956, 1973, 1977, 1980, dan 1991. Revisi atas kebijakan ini disesuaikan dengan tantangan-tantangan baru yang akan dihadapi India. Kebijakan Industri tahun 1956 memiliki tujuan memajukan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan industrialisasi yang dipadukan dengan semangat sosialis. Kebijakan Industri tahun 1956 yang berdasarkan pada ideologi sosialis ingin mencapai sebuah ekspansi pemerintah terhadap sektor publik, menerapkan substitusi impor, mengurangi ketergantungan asing.

Salah satu tujuan mendasar dari kebijakan industri 1956 adalah mengurangi ketimpangan regional negara bagian India. Namun, hasil daripada kebijakan ini justru sebaliknya, ketidakseimbangan regional terjadi di India. Laporan dari Dutt Committee, 4 wilayah industrialisasi maju yaitu Maharashtra, Gujarat, West Bengal dan Tamil Nadu mendapat keuntungan dari kebijakan industri ini dimana keuntungan mencapai 59,3 persen. Berbeda dengan wilayah miskin seperti Bihar, Orissa, Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh menerima keuntungan hanya 15,5 persen saja.

Pada revisi kebijakan industri 1980, kemudian diikuti oleh kebijakan industri tahun 1991 yang ditandai oleh keterbukaan ekonomi dengan mengikuti sistem kapitalis (Padmanabhan., *An Overview of Industrial Policy In India.* , 1933). Pemerintah India percaya bahwa kolaborasi antara investasi asing dan teknologi akan menghasilkan teknologi tinggi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan ekspor dan basis produksi. Hal itu yang melandasi pada penelitian Ibrahim berfokus pada kebangkitan perekonomian di India yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini akan menjadi salah satu referensi bagi penulis khususnya pada pembahasan bagaimana India dapat membangkitkan perekonomiannya serta memanfaatkan industri teknologi informasi hingga saat ini. Industri teknologi informasi India adalah salah satu menyokong pertumbuhan ekonomi karena memiliki dampak untuk berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat. Penulis banyak menggunakan referensi yang terdapat pada penelitian ini.

Selanjutnya penulis menggunakan referensi dari Haryo Prasodjo dalam skripsinya mengenai Liberalisasi Ekonomi dan Look East Policy India sebagai Faktor Pendorong Lahirnya Kerjasama ASEAN *India Free Trade Agreement* (Prasodjo H. , 2016). Memasuki tahun 1990an, industri teknologi informasi di India mulai berkembang. Pada masa ini India mulai menganut ekonomi liberal, ditandai dengan pencabutan Lisensi Raja dan berkembangnya perusahaan-perusahaan milik swasta yang berupa korporasi dan usaha menengah. Perekonomian India meningkat pesat. Meskipun India masih dianggap sebagai negara miskin, namun India mulai menaikkan level dalam produksi teknologi informasi dan telekomunikasi.

Amandemen Kebijakan Industri tahun 1991, selain merupakan pengembangan dari amandemen 1980, juga merupakan taktik atau kebijakan pemerintah India masalah ahli IT India yang kebanyakan bekerja di perusahaan IT Amerika Serikat. Pada masa itu, pemerintah sangat menyadari akan pentingnya peran teknologi dalam perekonomian negara. Bahkan beberapa perusahaan-perusahaan dari industri teknologi dan berbagai industri lain diizinkan oleh pemerintah untuk dimiliki 100% oleh orang asing (Robyn Meredith, 2010), yang menjelaskan awal mula bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional masuk sebebaskan-bebasnya ke India.

Masyarakat di India juga merupakan masyarakat yang berbasis pengetahuan (*Knowledge-based Society*). Dengan pola pikir yang canggih tersebut pemerintah India menggalakkan peningkatan ilmu pengetahuan tentang teknologi dan berusaha untuk mencetak tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut. Misi tersebut dijalankan dengan cara "*Brain Gain*". Pemerintah mengirimkan masyarakat India yang pantas ke Amerika Serikat dan Eropa untuk menimba ilmu teknologi yang telah dipelajari oleh kedua negara tujuan tersebut dengan harapan masyarakat akan

memperoleh ilmu yang berguna bagi kemajuan teknologi dan menerapkannya saat kembali ke India. Akan tetapi, pada kenyataannya, orang-orang yang telah dikirim pemerintah India tersebut tidak sedikit yang menetap di Amerika karena perusahaan-perusahaan teknologi informasi di Amerika, khususnya di Lembah Silikon, membutuhkan orang-orang India yang dinilai cakap dan pandai dalam bidang teknologi. Terlebih lagi, para IT dapat digaji dengan biaya yang relatif rendah. Hal tersebut tentu saja sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat.

Pada penelitian Haryo, penulis dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan India. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini industri teknologi informasi India memegang peran penting dalam membangun ekonomi negara, terlebih untuk mengimbangi strategi pembangunan ekonomi China, oleh karena itu pemerintah India harus lebih aktif dalam menyaring para ahli IT untuk kembali ke India setelah menimba ilmu diluar negeri dan membangun IT India agar dapat lebih baik dan bersaing dengan negara lain.

Selain tulisan dari Haryo Prasodjo, ada pula tulisan dari Indra Prasetyo (Prasetyo I. , 2005) yang dalam skripsinya juga menulis tema tentang kerjasama ekonomi India-Indonesia dengan judul Peningkatan Hubungan Kerjasama Antara Indonesia dan India Bidang Ekonomi Melalui *Comprehensive Economic Cooperation Agreement*. Dalam skripsinya Indra Prasetyo membahas bagaimana kerjasama antara Indonesia dan India dalam bidang ekonomi dimulai melalui perdagangan dan investasi dapat ditingkatkan. Dengan menggunakan landasan teori interdependensi dari Robert Keohane dan Joseph Nye tulisan ini mencoba menganalisis tentang mengapa terjadi peningkatan hubungan kerjasama kedua negara melalui *Compeherensive Economic Cooperation Agreement (CECA)*.

Indonesia melihat India sebagai negara yang *emerging power* di dunia. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi India yang meningkat drastis, bahkan mencapai 8,6% pada tahun 2010. Selain itu, India dan Indonesia mempunyai banyak persamaan yang mempermudah kerjasama kedua negara misalnya, dalam hal budaya, agama, bahasa, dan karakter kebangsaan. Kedua negara memiliki kepentingan, Indonesia belajar dari India tentang kebijakan pemerintah dalam membangun perekonomiannya. Maka dari itu, kebijakan ekonomi dalam tulisan ini akan menjadi referensi yang baik bagi penulis.

Selanjutnya, penulis memakai penelitian dari Haiyyu Darman Moenir tahun 2010 pada skripsinya yang membahas dampak kemajuan perekonomian China dan India serta implikasinya terhadap ASEAN. Sejak merdeka tahun 1947 sampai tahun 1990, aktivitas ekonomi India berjalan sangat lamban. Kondisi ini akibat kebijakan ekonominya tidak pro pasar, campur tangan pemerintah yang sangat kuat dan mengandalkan substitusi impor. Namun sejak terjadi kesulitan neraca pembayaran tahun 1991 memaksa India harus melakukan reformasi ekonomi. (Abduraxmonovich, 2003).

Dalam skripsinya, Haiyyu juga membahas perekonomian China. Pesatnya pertumbuhan ekonomi China mendorong China melakukan ekspansi pasar besar-besaran. Ekspansi pasar meski terkesan dilakukan dengan hati-hati, cukup meresahkan negara-negara tetangga, Jepang, Korea Selatan, dan negara ASEAN, karena diikuti basis pertumbuhan ekonominya yang kuat. China telah tampil sebagai *the new miracle of Asia*, sejajar dengan negara-negara *the big economic of Asia* seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong, yang pernah disebut-sebut sebagai pusat keajaiban ekonomi Asia. Berdasarkan skripsi

Haiyyu, penulis menilai ekspansi pasar yang dilakukan China telah mengarah ke India untuk itu perlu adanya daya saing yang diciptakan oleh India guna menghadapi potensi persaingan pangsa pasar dari China.

Melalui referensi Haiyyu, penulis menilai bahwa India sudah saatnya menciptakan daya saing terutama pada penelitian ini melalui industri teknologi informasi agar dapat mempertahankan potensi pangsa pasarnya yang cukup besar. Berangkat dari hal tersebut, India dapat meningkatkan beberapa indikator untuk mendukung industri teknologi informasinya. Hal-hal itu yang akan menjadi fokus penulis dalam bab pembahasan selanjutnya.

Referensi-referensi yang telah dipaparkan membahas tentang perekonomian serta industri teknologi informasi, namun penulis juga menggunakan referensi dari Syaiful Anam dan Ristiyani dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. Penelitian tersebut membahas tentang BRI yang merupakan salah satu kebijakan ekonomi ambisius yang dikeluarkan China pada masa pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2013.

BRI mencakup dua aspek yaitu *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road* yang kemudian disingkat *Belt and Road*. Tujuan dikeluarkannya BRI yaitu untuk menghubungkan ekonomi Eurasia dengan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Namun, dibalik tujuan tersebut, China sebenarnya memiliki beberapa agenda lain dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Berikut 3 faktor yang mendorong China membuat kebijakan BRI menurut neorealisme yaitu:

Pertama, kepentingan nasional China dalam mengamankan jalur pasokan energi yang menghubungkan China ke Timur Tengah sekaligus mencari sumber energi alternatif di Asia Tengah. Asumsi ini terbukti dari kerjasama yang dilakukan China dengan Pakistan lewat proyek infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan pipa gas, serta keputusan Pakistan memberikan kontrol dan manajemen operasional pelabuhan Gwadar di lautan Arabia kepada perusahaan China, menawarkan akses ke Teluk Persia dan seluruh kawasan Timur Tengah.

Kedua, karena ambisi China dalam mengambil alih peran kepemimpinan di kawasan yang terlihat dari usaha menyebarluaskan pengaruhnya lewat proyek kereta cepat yang kemudian bersaing dengan Jepang. Sebagian besar negara-negara yang ada di kawasan Asia menyambut positif proyek China sehingga dapat menjadi indikasi bahwa China berhasil meningkatkan pengaruhnya.

Ketiga, BRI sebagai upaya China dalam membangun hegemoni baik itu di bidang keamanan maupun ekonomi. Di bidang keamanan, China berusaha membentuk tatanan keamanan baru dengan mengajak negeranegara di kawasan untuk mengeluarkan AS dari urusan keamanan Asia. Sedangkan di bidang ekonomi, China membentuk AIIB yang kemudian menantang institusi yang telah lama dibangun AS yaitu World Bank dan IMF maupun IFI yang sudah ada seperti ADB.

Penjelasan mengenai China serta strategi BRI cukup untuk menjadi referensi penulis dalam mengkaji sejauh mana pembangunan ekonomi China secara tidak langsung memengaruhi India untuk mengimbangi strategi tersebut melalui pembangunan industri teknologi informasinya.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis ingin lebih memfokuskan penelitian kali ini pada usaha yang dilakukan India untuk menciptakan daya saing melalui industri teknologi informasi India guna mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China. Dengan adanya beberapa rujukan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penulis akan memasukan beberapa hasil dari kegiatan India dalam memacu pertumbuhan sosial ekonomi dengan cara yang berbeda.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Michael E. Porter: Tahap Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara

Untuk membantu melihat alasan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh China, penulis akan menggunakan empat indikator yang dikemukakan oleh Michael Porter dalam mengidentifikasi pertumbuhan / perkembangan ekonomi sebuah negara yang dalam hal ini adalah ekonomi China (Porter., 1990), diantaranya:

1. *Factor-driven*. Pada dasarnya, dalam tahap ini negara bersaing terutama hanya dalam penggunaan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki. Hal ini juga didukung lewat upah tenaga kerja yang murah.
2. *Investment-driven*. Tahap ini berada pada posisi dimana pertumbuhan suatu negara mampu untuk berinvestasi, baik negara maupun perusahaan di dalam negara tersebut untuk berinvestasi secara agresif, yang bertujuan untuk mendorong proses produksi yang lebih efisien dan peningkatan kualitas dari produk. Hal itu didasari pada kemampuan dan kesiapan negara tersebut untuk berinvestasi terhadap teknologi yang lebih modern dan maju. Pembangunan ekonomi pada tahap ini umumnya berkonsentrasi pada

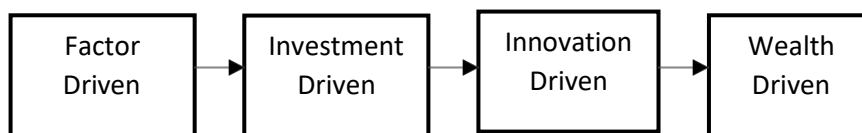
manufaktur. Dalam tahap ini, negara meningkatkan keunggulan daya saing lebih berdasarkan pada tingkat pasokan yang tinggi dan permintaan yang rendah.

3. *Innovation-driven*. Dalam tahap ini, kemampuan untuk menghasilkan produk dan layanan yang inovatif dibandingkan dengan aktor lainnya menjadi hal penting bagi keunggulan daya saing yang dimiliki oleh aktor tersebut. Pada tahap ini pula, lingkungan ekonomi ditandai dengan spesialisasi di berbagai bidang yang lebih mapan. Spesialisasi menjadi motor penting, dimana tidak hanya dalam menghasilkan produktivitas, tetapi juga mendorong inovasi. Negara pun bersaing dengan strategi yang unik dalam lingkup global, dan berinvestasi lebih kepada inovasi-inovasi terkait teknologi hingga penelitian dan pengembangan, intinya meningkatkan kapasitas aktor dalam bersaing dan lebih inovatif dibandingkan aktor lainnya.
4. *Wealth-driven*. Pada akhirnya, tahapan pertumbuhan suatu negara mengalami penurunan. Dalam tahap ini, negara-negara akan berusaha melindungi apa yang mereka miliki, dan mulai kehilangan produktivitasnya baik dalam memproduksi maupun berinvestasi. Porter mengungkapkan tahap ini terjadi karena “*the wealth that has already achieved*”. Tahap selanjutnya setelah ini pun negara tersebut akan kembali kepada tahap-tahap yang sebelumnya, baik itu berangkat kembali dari *factor-driven*, *investment driven*, ataupun *innovation-driven*.

Porter dalam memberikan empat tahap ini berusaha untuk menjelaskan bahwa suatu negara mengalami fase pertumbuhan seperti manusia. Perkembangan awal

dimulai dengan tenaga kerja murah, tahap selanjutnya, yakni negara sebagai seorang pemuda mengalami tahap pembangunan dan pertumbuhan, di mana investasi menjadi mesin utama pertumbuhan dalam meningkatkan kualitas produksi, lewat *upgrading* peralatan dan pelatihan angkatan kerja. Negara selanjutnya memperoleh kedewasaan penuh saat memasuki periode berbasis inovasi dimana pertumbuhan berasal dari peningkatan produk dan proses manufaktur yang lebih baik. Usia tua membawa tahap berbasis kekayaan dimana negara-negara berusaha melindungi apa yang mereka miliki.

Tabel 1 Empat Tahapan dari Pertumbuhan Ekonomi Sebuah Negara



Sumber: Michael E. Porter, 1990, hlm. 587.

Sebagaimana dua fase awal telah dilalui oleh China yang puncaknya ditunjukkan oleh pertumbuhan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir dan saat ini sedang berada dalam fase transisi ke tahap ke tiga. Hal itu dipicu oleh tingginya nilai kerusakan yang diciptakan oleh China pada kedua fase sebelumnya, dan kondisi China saat ini pun terlihat tidak mampu mendorong pertumbuhan yang bersifat berkelanjutan.

Hal itu dikarenakan salah satu faktor sistem politiknya yang terlalu bersifat ekstraktif, yang dalam hal ini kurangnya perlindungan atas hak kekayaan properti dan intelektual, serta beban yang terlalu berat diberikan pada pemerintah China untuk membangun perusahaan sendiri (Badan Usaha Milik Negara/BUMN), sehingga membuat banyak perusahaan multinasional ragu untuk melakukan

kegiatan *research and development* (R&D) yang serius di China, hal itu merupakan salah satu faktor rendahnya inovasi yang ada di China (Engardio., 2007).

Dengan adanya kenyataan tersebut, maka strategi pembanguana ekonomi inklusif China yang bersifat massif telah mengarah pada potensi pangsa pasar India dengan melakukan penjualan-penjualan produk ke India seperti produk sepatu olahraga dari Li-Ning. Beberapa hal tersebut yang kemudian memicu India untuk melakukan pembangunan industri teknologi informasi yang dinilai mampu mendongkrak kembali minat masyarakat India terhadap produk-produk India serta mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China.

2.2.2 Konsep *Competitive Advantage*

Michael Porter mendefinisikan dua cara bahwa suatu organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif dibandingkan pesaingnya: keunggulan biaya dan keunggulan diferensiasi. Keunggulan biaya adalah ketika bisnis menyediakan produk dan layanan yang sama dengan pesaing, tetapi dengan biaya lebih rendah. Keunggulan diferensiasi adalah ketika bisnis menyediakan produk dan layanan yang lebih baik sebagai pesaing. Dalam pandangan Porter, manajemen strategis harus peduli dengan membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif (Porter M. E., 1985).

"Keunggulan kompetitif adalah jantung dari kinerja perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan benar-benar menempatkan strategi-strategi generik ke dalam praktik." (Porter M. E., 1985).

Keunggulan kompetitif berupaya mengatasi beberapa kritik terhadap keunggulan komparatif. Keunggulan kompetitif memiliki anggapan bahwa tenaga kerja murah ada di mana-mana dan sumber daya alam tidak diperlukan untuk ekonomi yang baik. Teori lain, keunggulan komparatif, dapat menyebabkan negara-negara berspesialisasi dalam mengekspor barang-barang primer dan bahan mentah yang menjebak negara-negara di ekonomi berupah rendah karena persyaratan perdagangan. Keunggulan kompetitif berupaya untuk memperbaiki masalah ini dengan menekankan pada memaksimalkan skala ekonomi dalam barang dan jasa yang menghasilkan harga premium (Warf, 2007).

Tiga bentuk strategi kompetitif generik:

1. Strategi kepemimpinan biaya; Kepemimpinan biaya adalah kemampuan bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang akan dengan biaya lebih rendah daripada pesaing lainnya. Jika bisnis mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang sama tetapi menjualnya dengan harga lebih murah, ini memberi mereka keunggulan kompetitif dibandingkan bisnis lain. Oleh karena itu, ini memberikan nilai harga kepada pelanggan. Biaya yang lebih rendah akan menghasilkan laba yang lebih tinggi karena bisnis masih menghasilkan keuntungan yang wajar untuk setiap barang atau jasa yang dijual. Jika bisnis tidak menghasilkan laba yang cukup besar, Porter merekomendasikan menemukan basis biaya yang lebih rendah seperti tenaga kerja, bahan, dan fasilitas. Ini memberi bisnis biaya produksi lebih rendah daripada pesaing lainnya (Porter, 2007). Perusahaan dapat menambah nilai kepada pelanggan melalui transfer manfaat biaya kepada mereka.

2. Strategi diferensial; Keunggulan diferensial adalah ketika produk atau layanan bisnis berbeda dari para pesaingnya. Michael Porter merekomendasikan membuat barang atau jasa itu menarik untuk menonjol dari pesaing. Bisnis akan membutuhkan riset, pengembangan, dan pemikiran desain yang kuat untuk menciptakan ide-ide inovatif. Peningkatan pada barang atau layanan ini bisa termasuk memberikan kualitas tinggi kepada pelanggan. Jika pelanggan melihat suatu produk atau layanan berbeda dari produk lainnya, konsumen bersedia membayar lebih untuk menerima manfaat ini (Porter, 2007).
3. Strategi fokus; Strategi fokus idealnya mencoba membuat bisnis membidik beberapa target pasar daripada mencoba menargetkan semua orang. Strategi ini sering digunakan untuk bisnis kecil karena mereka mungkin tidak memiliki sumber daya atau kemampuan yang tepat untuk menargetkan semua orang. Bisnis yang menggunakan metode ini biasanya fokus pada kebutuhan pelanggan dan bagaimana produk atau layanan mereka dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam metode ini, beberapa perusahaan bahkan dapat membiarkan konsumen memberikan input untuk produk atau layanan mereka (Porter, 2007). Strategi ini juga dapat disebut strategi segmentasi, yang meliputi segmentasi geografis, demografis, perilaku dan fisik. Dengan mempersempit pasar ke segmen yang lebih kecil, bisnis dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Porter percaya bahwa begitu bisnis telah memutuskan kelompok apa yang akan mereka targetkan, penting untuk memutuskan apakah mereka akan mengambil pendekatan

kepemimpinan biaya atau pendekatan diferensiasi. Strategi fokus tidak akan membuat bisnis sukses.

Penulis berusaha mengkaji bagaimana kontribusi dari pembangunan industri teknologi informasi India dalam mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China yang berpotensi mengarah pada pangsa pasar di India. Jika mengarah pada apa yang telah dipaparkan pada keunggulan kompetitif, maka India memiliki beberapa pilihan dalam mengembangkan produk-produk lokalnya.

India perlu mengkaji lebih lanjut strategi mana diantara strategi-strategi yang telah ditawarkan Porter, yang dinilai cukup efektif dalam membangun industri teknologi informasi. Apabila melakukan strategi keunggulan biaya, India harus menemukan celah untuk dapat menurunkan biaya produk kepada pelanggan dengan kualitas yang tetap terjaga, misalkan dengan melatih tenaga kerja dengan baik sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga lebih.

Apabila India melakukan strategi diferensial, maka India harus melakukan inovasi pada produknya agar mampu menjadi fokus pelanggan dibandingkan dengan produk lain. Namun, jika India melakukan strategi fokus, India harus memiliki tolak ukur yang baik serta akurat akan kebutuhan masyarakat India agar pasar yang dituju sesuai dengan produk yang akan dikembangkan oleh India.

Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah India agar dapat menciptakan suatu kebijakan yang tepat dalam melakukan pembangunan industri teknologi informasi yang berkontribusi baik untuk mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China yang saat ini tengah mengarah pada potensi pangsa pasar India.

2.2.3 Konsep Kebijakan Publik

Perkembangan studi kebijakan publik terus berkembang seiring terjadinya perubahan lingkungan birokrasi publik. Pengertian kebijakan publik atau negara juga didefinisikan berbeda oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Dye (Dye, 2005) bahwa kebijakan negara sebagai *“is whatever government choose to do or not to do”* (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah.

“is what government say and do, or not do, it is the goals or purposes of government programs” (adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah).
(Dye, 2005).

Berdasarkan pengertian di atas bagaimanapun rumusannya pada hakikatnya kebijakan negara mengarah kepada kepentingan publik, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu, maka kebijakan negara dapat disimpulkan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah, baik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatankekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.” (Dye, 2005)

Berdasarkan pengertian tentang kebijakan publik yang telah diuraikan, Islamy mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan negara (*public policy*), yaitu:

- a. Bahwa kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat (Islamy, 1998).

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parson, 1997). Kebijakan yang telah

diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup panjang. Dye menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya (Parson, 1997):

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan

Melalui penjabaran konsep kebijakan publik, penulis mencoba mengkaji bagaimana proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh India. Penelitian ini akan membahas bagaimana upaya India dalam menciptakan daya saing melalui industri teknologi informasi guna mengimbangi strategi pembangunan ekonomi China.

Beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian India dalam melakukan proses kebijakan akan menjadi fokus bagi pemerintah India karena pada situasi ini, India merasa perlu menjaga potensi pangsa pasar lokal dari strategi pembangunan ekonomi inklusif China yang sudah mengarah pada pangsa pasar India. Ditengah

kekhawatiran India akan potensi pangsa pasarnya yang menjadi sasaran China, India juga harus mengembangkan industri teknologi informasi melalui beberapa indikator yang akan dibahas oleh penulis.

Oleh karena itu, setelah India menemukan strategi yang dianggap cukup efektif dalam menciptakan daya saing industri teknologi informasi serta mengimbangi strategi pembangunan ekonomi inklusif China, India diharapkan dapat melakukan proses pengambilan kebijakan yang tepat guna memelihara potensi pangsa pasar lokal.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta rumusan masalah, maka penulis membuat hipotesis penelitian berupa;

“Jika strategi pembangunan ekonomi inklusif China yang mengarah pada industrialisasi bersifat masif serta orientasi perluasan pangsa pasar, maka arah dan tindakan melalui daya dukung inovasi, pembangunan sumber daya manusia, serta keberadaan infrastruktur merupakan prasyarat proses pembangunan industri teknologi informasi di India”

2.4 Operasionalisasi Variabel

Variable dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Variable (Analisis)
<p>Variabel Bebas:</p> <p><i>Strategi pembangunan ekonomi inklusif China.</i></p>	<p>1. Pembangunan industrialisasi yang bersifat masif oleh China</p> <p>2. Perluasan pangsa pasar industrialisasi China</p>	<p>1. Sejumlah merek ponsel China membuat merek kedua seperti Oppo, Huawei, Xiaomi sebagai bentuk strategi memperluas pangsa pasar. Sumber: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190109173030-185-359669/strategi-memecah-merek-ponsel-jadi-tren-produsen-china</p> <p>2. Pertumbuhan didefinisikan sebagai inklusif jika meningkatkan fungsi kesempatan sosial. Sumber: https://www.researchgate.net/publication/325313420_Komparasi_Pertumbuhan_Ekonomi_Inklusif_Di_33_Provinsi_Indonesia_Tahun_2010-2015_Studi_Kasus_Menggunakan_Metode_Pendekatan_ADB_WEF_DAN_UNDP/link/5b051eacea2725832b242d4/download</p>

<p>Variabel Terikat:</p> <p><i>Arah dan tindakan</i></p> <p><i>India dalam</i></p> <p><i>Pembangunan</i></p> <p><i>Industri Teknologi</i></p> <p><i>Informasi.</i></p>	<p>1. Inovasi industri teknologi informasi</p> <p>2. Pembangunan sumber daya manusia</p> <p>3.Keberadaan infrastruktur</p>	<p>1. Meningkatkan daya saing industri kecil menengah melalui inovasi dan pemanfaatan jaringan sosial: industri software India.</p> <p>Sumber: http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/254</p> <p>2. Pemerintah India mengirim masyarakatnya untuk menimba ilmu teknologi ke Amerika Serikat agar menciptakan tenaga kerja yang ahli.</p> <p>Sumber: http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2702/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y</p> <p>3. Pemerintah mendukung produsen peranti IT dari India seperti <i>Infosys Technologies, National Institute of Information technology, Aptech Software Solution, Satyam Computer, Tata Infitech, Wipro, BFL Software, Polaris Financial</i></p>
--	--	--

		<p><i>Technology</i> untuk membangun infrastruktur teknologi.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://inet.detik.com/cyberlife/d-2675924/mengintip-industri-it-di-lembah-silikon-india</p> <p>https://teknologi.bisnis.com/read/20140916/105/257755/http</p>
--	--	--

2.5 Skema dan Alur Penelitian

